

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis pada uraian bab-bab terdahulu dan didasari data yang ada di lapangan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan DPRD Kabupaten Tebo dalam Mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah, khususnya pelaksanaan hak inisiatif belum optimal karena tidak adanya rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa DPRD. Peranan DPRD Kabupaten Tebo hanya terlihat pada pembahasan suatu rancangan Peraturan Daerah Yang berasal dari prakarsa eksekutif.
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi DPRD Kabupaten Tebo dalam proses Pembahasan peraturan daerah khususnya yang berasal dari inisiatif dewan antara lain adalah Permasalahan ini dikarenakan oleh kemampuan anggota dewan yang masih kurang memadai dalam menggunakan hak inisiatifnya, latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan anggota dewan yang belum memadai ditambah dengan minimnya penguasaan teknik perancangan peraturan perundang-undangan oleh anggota dewan serta keterbatasan anggaran dan kurang berperannya partai politik dalam menyiapkan kader-kader untuk duduk di lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan DPRD Kabupaten Tebo dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat peranan DPRD Kabupaten Tebo dalam Mekanisme Pembahasan peraturan daerah di Kabupaten Tebo, yaitu antara lain Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota DPRD Kabupaten Tebo yang diupayakan dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus, seminar dan diskusi ilmiah diperguruan tinggi; Mengalokasikan anggaran, dengan cara mengusulkan anggaran tersebut agar masuk kedalam anggaran

kegiatan DPRD Kabupaten Tebo; Mengadakan studi banding dengan badan legislatif daerah lainnya; serta Kerjasama dengan pihak eksekutif.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk meningkatkan peranan DPRD Kabupaten Tebo dalam Mekanisme Pembahasan peraturan daerah di Kabupaten Tebo, yaitu :

1. Peranan DPRD dalam Pembahasan suatu kebijakan daerah, maka perlu didatangkan staf ahli yang terdiri dari beberapa pakar dengan latar belakang keahlian yang berbeda antara lain pakar politik, pakar pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait sehingga DPRD Kabupaten Tebo dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kemudian penyediaan tenaga ahli yang diambil dari pakar perguruan tinggi terdekat (lokal dan regional) yang memang ahli dibidangnya juga dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran dari keterbatasan anggaran melalui manajemen yang baik, tenaga ahli ini sedapat mungkin terdiri dari orang-orang non partisan yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan DPRD. Perbedaan pandangan dalam tubuh dewan sebagai akibat dari latar belakang pekerjaan anggota DPRD yang berbeda dapat diatasi dengan menyatukan persepsi anggota DPRD melalui “semiloka” secara rutin dengan topik-topik aktual dan mendatangkan pembicara dari perguruan tinggi, LSM, atau pejabat pemerintah yang memang ahli dibidangnya.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkat pendidikan anggota DPRD dapat diatasi dengan menetapkan secara tegas pendidikan anggota dewan serendah-rendahnya lulusan SMA atau sederajat. Kurangnya berperannya

Partai politik dalam menyiapkan kader-kadernya dapat diselesaikan dengan rekrutmen dan jalur seleksi yang ketat sesuai dengan ketentuan dan aturan dari parpol tersebut dalam merekrut kadernya.

3. Kepada setiap anggota DPRD disarankan untuk lebih menyuarkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan partai politiknya. Harus diaktualisasikan secara nyata bahwa keberadaan mereka di DPRD bukan sebagai wakil partai, melainkan wakil dari rakyat meskipun mereka terpilih melalui partai yang mencalonkannya. Hal itu di wujudkan dengan cara lebih mendahulukan aspirasi masyarakat ketimbang kemauan dari Partai politik. Kepada setiap DPRD disarankan agar secara aktif mengikuti perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat ditingkat daerah maupun nasional baik dari media elektronik maupun media cetak serta memperbanyak dialog dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui kondisi serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya.